

Respons Vaccine-Derived Poliovirus di Indonesia

Laporan situasi no. 24
27 Mei–22 Juni 2024



Akses [versi Bahasa Inggris](#)

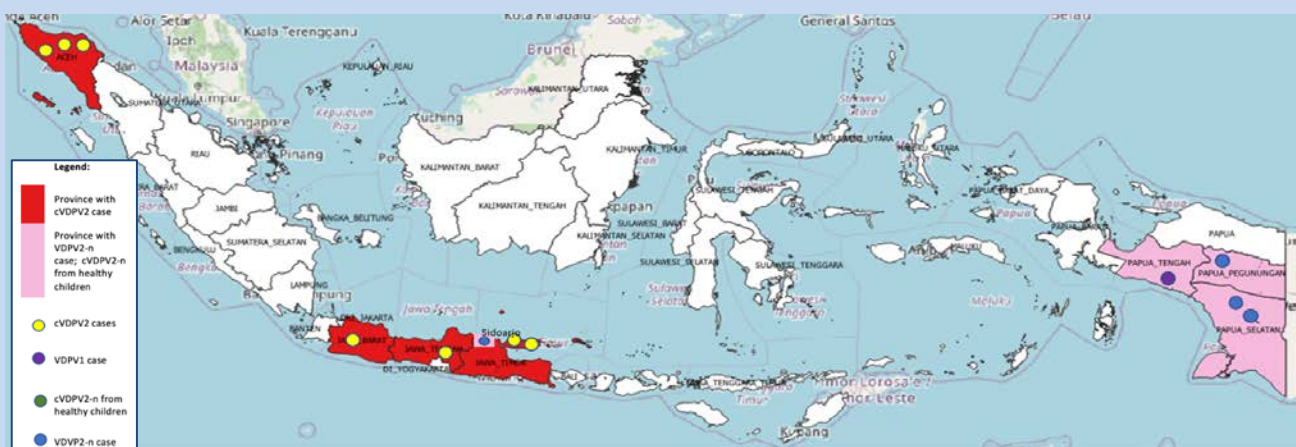


Daftar isi:

[Situasi Terkini](#)
[Perencanaan dan koordinasi](#)
[Pelaksanaan PIN](#)
[Surveilans](#)
[Pengelolaan logistik dan vaksin](#)



Konfirmasi kasus di Indonesia (2022–2024)¹



7 kasus cVDPV2

- Aceh:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Pidie
 - 1 kasus lumpuh layu di Aceh Utara
 - 1 kasus lumpuh layu di Bireuen
- Jawa Barat:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Purwakarta
- Jawa Tengah:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Klaten
- Jawa Timur:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Pamekasan
 - 1 kasus lumpuh layu di Sampang

Tingkat KLB: **2**

Respons KLB:

- Jawa Timur dan Jawa Tengah: Anak 0–7 tahun
- Sleman, DI Yogyakarta: Anak 0–7 tahun

Konfirmasi KLB:

- Total kasus AFP dengan cVDPV2: 3
- Total anak sehat yang terinfeksi cVDPV2: 9

Tanah Papua

- 1** kasus VDPV1
- 1 kasus lumpuh layu di Mimika

- 8** kasus cVDPV2-n
- 8 anak sehat terinfeksi di Mimika

- 4** kasus cVDPV2-n
- 1 kasus lumpuh layu di Nduga
 - 3 anak sehat terinfeksi

- 2** kasus VDPV2-n
- 1 kasus lumpuh layu di Asmat and Mappi

Jawa Timur

- 1** kasus VDPV2-n
- 1 kasus lumpuh layu di Sidoarjo

¹ cVDPV2: Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2.
cVDPV2-n: Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2 dari vaksin nOPV2.
VDPV2-n: Vaccine-Derived Poliovirus type 2 dari vaksin nOPV2.
VDPV1: Vaccine-Derived Poliovirus type 1.

RESPONS KLB POLIO

PIN polio di Pulau Papua

Perencanaan dan koordinasi

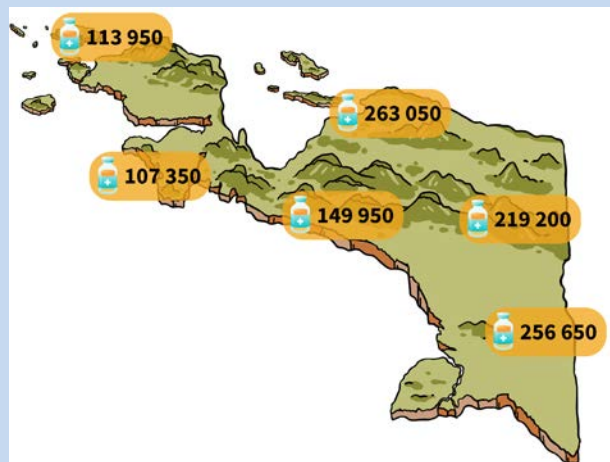
Kemenkes mengadakan pertemuan evaluasi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tahap 1 di Pulau Papua, mengundang pemangku-pemangku kepentingan utama seperti Kemenko PMK, Kemendagri, dan kepala dinkes provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan evaluasi ini, Kemendagri menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk mendukung dan mengalokasikan pendanaan untuk PIN, surat ini sebagai landasan dinkes kabupaten/kota dan puskesmas bisa memperoleh izin penggunaan anggaran daerah.

PIN polio

Kemenkes dan mitra mengarahkan berbagai kegiatan untuk pelaksanaan PIN polio di kabupaten/kota, seperti membuka lebih banyak pos imunisasi, kunjungan pemantauan, pendampingan teknis, peningkatan kapasitas, pertemuan advokasi dan koordinasi, sosialisasi, dan kunjungan rumah ke rumah. WHO membantu dinkes kabupaten/kota mencari solusi untuk permasalahan seperti akses ke daerah-daerah terpencil dan sulit diakses. UNICEF juga mengadakan sosialisasi dan pertemuan koordinasi.

Pengelolaan logistik dan vaksin

Sebanyak **1.083.150 dosis vaksin** dilaporkan telah diterima di Pulau Papua. Masih tersedia 285 vial nOPV2 (1 vial = 50 dosis) untuk puskesmas-puskesmas yang belum memulai kegiatan PIN karena berbagai tantangan seperti jadwal akreditasi, relokasi, cuaca buruk, tantangan geografis.



Distribusi vaksin di Pulau Papua menurut data SMILE per 17 Juni 2024

Masalah utama

- **Frekuensi layanan yang rendah:** sebagian puskesmas hanya menjalankan satu pos PIN per hari.
- **Supervisi yang suboptimal:** supervisi dinkes provinsi dan kabupaten/kota atas kegiatan PIN masih belum cukup.
- **Kapasitas:** sebagian puskesmas tidak menjalankan layanan polio akibat adanya jadwal akreditasi, keamanan, dan kesenjangan data.

Rencana tindak lanjut

- Mengoptimalkan pos imunisasi PIN dan posyandu.
- Meningkatkan supervisi dan pemantauan puskesmas.
- Menggandeng pemerintah setempat dan entitas dari berbagai sektor.
- Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sumber daya, khususnya dana dan SDM.

Informasi kontak

Kementerian Kesehatan:
Direktorat Pengelolaan Imunisasi

imunisasi.tamsus@gmail.com
survpd3i.kipi@gmail.com

WHO:
Dr Stephen Chacko
chackos@who.int

Dr Sudhir Joshi
joshisu@who.int

UNICEF:
Dr Gopinath Durairajan
gdurairajan@unicef.org

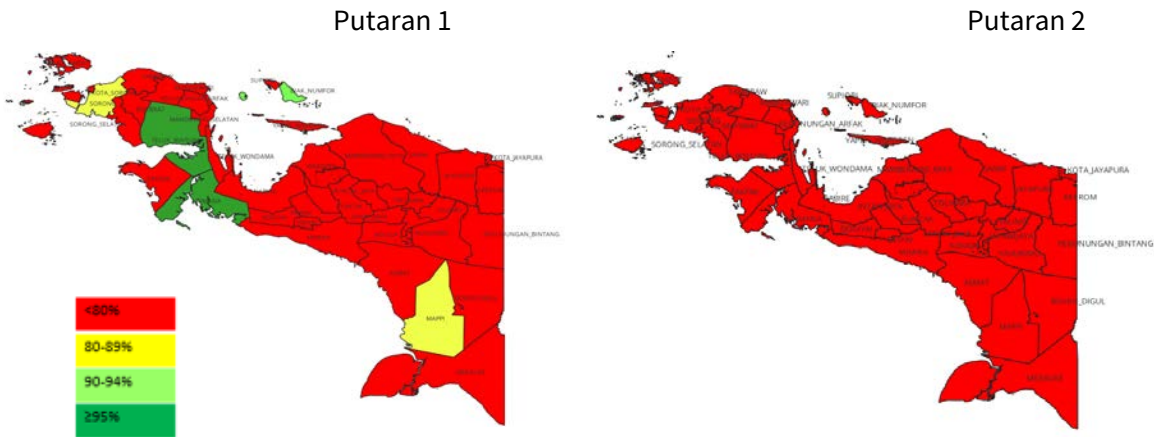
Dr Kenny Peetosutan
kpeetosutan@unicef.org

Situasi Terkini

- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merencanakan dua tahap pelaksanaan PIN². Tahap 1 dilaksanakan di Pulau Papua dan tahap 2 di 27 provinsi. Kedua tahap ini menargetkan sasaran sekitar 17,4 juta anak usia 0–7 tahun.
- PIN polio tahap 1 dimulai pada 27 Mei 2024, dengan sasaran 865.690 anak dan akan diadakan dalam dua putaran. Per 22 Juni, kegiatan ini telah menjangkau 44,9% sasarannya dalam putaran pertama dan 5,7% pada putaran kedua (data dapat dilihat di tabel di bawah). Angka ini mengindikasikan cakupan imunisasi yang rendah. Namun, dua kabupaten di Provinsi Papua Barat – Teluk Bintuni dan Kaimana – berhasil mencapai sasaran nasional, masing-masing dengan cakupan 97,9% dan 96,9% pada putaran pertamanya (gambar 1).

Provinsi	Sasaran anak usia 0–7 tahun	Imunisasi putaran 1	%	Imunisasi putaran 2	%
Papua Barat	85.718	66.952	78,1	3.612	4,2
Papua Barat Daya	91.043	64.405	70,7	1.368	1,5
Papua Selatan	119.922	75.393	62,9	15.264	12,7
Papua	188.659	94.162	49,9	17.487	9,3
Papua Tengah	205.121	74.639	36,4	10.303	5,0
Papua Pegunungan	175.227	13.499	7,7	1.300	0,7
Total	865.690	389.050	44,9	49.33.	5,7

*Per 22 Juni 2024, data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes



Gambar 1. Cakupan imunisasi nOPV2 dalam putaran 1 (kiri) dan putaran 2 (kanan) PIN di Pulau Papua.

- Angka lumpuh layu akut bukan polio (NPAFP), yang merupakan indikasi kejadian polio, idealnya di atas 3/100.000 populasi di bawah usia 15 tahun selama kejadian luar biasa (KLB) terjadi. Angka NPAFP yang tinggi mengindikasikan sensitivitas surveilans yang baik dan risiko terlewatnya transmisi polio yang rendah. Indonesia mencapai angka NPAFP 6,45/100.000 pada 2023. Kemenkes mengidentifikasi provinsi yang berisiko tinggi untuk mencapai standar minimum pelaporan kasus lumpuh layu akut saat KLB. Angka

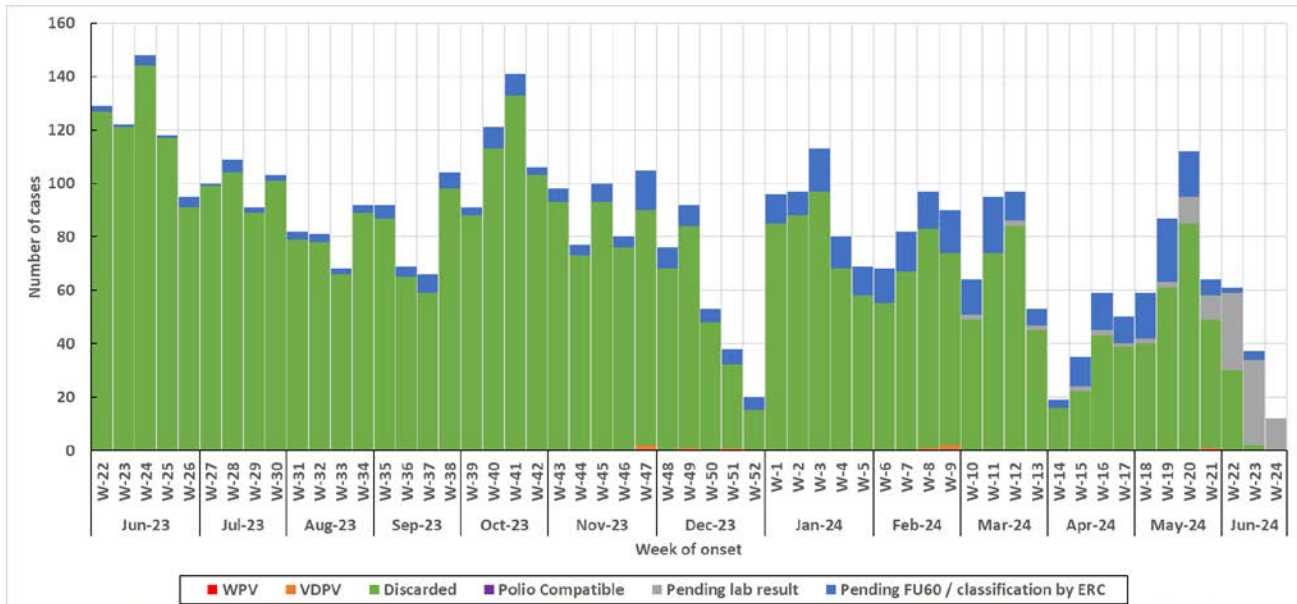
² Pekan Imunisasi Nasional (PIN) merupakan kegiatan vaksinasi polio (nOPV2) yang digelar selama satu pekan dalam dua putaran dengan vaksin nOPV2 untuk semua anak usia 0–7 tahun di semua provinsi, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.

minimum laporan adalah di atas 3 dan telah dicapai selama kuartal kedua tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel berikut menunjukkan kemajuan provinsi-provinsi sasaran yang mengalami KLB dan menjalankan respons kejadian pada kuartal 2 tahun 2024.

Provinsi	Target penemuan kasus AFP 2024	Target penemuan kasus AFP kuartal 2 2024	Kasus AFP yang telah dilaporkan	Capaian NPAFP tahunan per 100.000 populasi di bawah 15 tahun (sasaran ≥ 3)
Jawa Tengah	488	244	254	6,00
DI Yogyakarta	54	27	18	4,31
Jawa Timur	530	265	251	4,36
Papua Tengah	22	11	6	1,30
Papua Pegunungan	26	13	1	0,00
Papua Selatan	14	7	8	3,79
Papua	22	11	7	2,39
Papua Barat	16	8	9	3,26
Papua Barat Daya	16	8	2	0,82
Indonesia	4.448	2.224	1.703	3,92

Terdapat tantangan besar
 Masih ada tantangan
 Sasaran tercapai

- Dibandingkan dengan laporan sebelumnya, laporan lumpuh layu akut mengalami peningkatan. Sebelumnya laporan sebelumnya adalah 1 229 dan sekarang laporan bertambah sebanyak 474. Ini merupakan pencapaian yang baik, walaupun target (2 224) pada kuartal ini belum tercapai. Kemenkes telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laporan lumpuh layu melalui pengkajian, umpan balik, dan melakukan review di kabupaten/kota yang tidak memiliki laporan (*silent districts*).



WPV: Wild Poliovirus; VDPV: Vaccine-Derived Poliovirus;

Discarded:

- Cases adequately investigated with no laboratory evidence of WPV or VDPV infection, OR
- Cases with inadequate specimens resolved within 60 days of paralysis onset or deemed not compatible with poliomyelitis by the national ERC.

Compatible: A suspected case lacking adequate specimens with no WPV or VDPV isolation in stool, with residual paralysis after 60 days, deemed compatible with poliomyelitis by the national ERC.

Pending Lab Result: A suspected case with collected specimens awaiting lab results.

Pending FU60: A suspected case with inadequate specimens awaiting a follow-up visit 60 days after paralysis onset.

Pending Classification by ERC: A suspected case with inadequate stool samples, residual paralysis, lost to follow-up, or deceased, requiring ERC classification.

Gambar 2. Klasifikasi final kasus AFP di Indonesia dalam 12 bulan terakhir, per 20 Juni 2024

Respons KLB

Perencanaan dan koordinasi

DUKUNGAN NASIONAL		
Tanggal	Tempat	Kegiatan
7 Juni 2024	Jakarta	Kemenkes mengadakan pertemuan daring untuk mengevaluasi PIN polio tahap 1 di Pulau Papua. Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kepala dinas kesehatan (dinkes) provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu tindak lanjut pertemuan ini adalah diterbitkannya surat edaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan PIN. Upaya komunikasi dan diseminasi masif dilakukan lebih lanjut dengan sumber daya yang ada seperti grup percakapan aplikasi, mobil komunikasi keliling, penempatan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di tempat-tempat strategis, video testimoni, penguatan advokasi untuk pemimpin daerah, dan pelibatan sektor dan program lain, termasuk camat/kepala distrik, kepala desa, tokoh agama, organisasi profesional, dan kader dalam menjalankan kegiatan <i>sweeping</i> .
21 Juni 2024	Jakarta	Setelah berkoordinasi dengan Kemenkes, Kemendagri menerbitkan surat edaran kepada pimpinan daerah untuk mendukung dan mengalokasikan dana untuk PIN. Surat edaran ini memungkinkan sekretaris jenderal Kemenkes mengakses dana dari anggaran negara untuk puskesmas.
TANAH PAPUA		
27 Mei, 4 Juni, 10 Juni 2024	Kota Sorong dan Kabupaten Kaimana	Dinkes Kabupaten Sorong mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 27 Mei dengan berbagai unit, termasuk unit imunisasi, surveilans, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengelolaan sumber daya kesehatan, dan farmasi. Selain itu, rapat koordinasi dengan kecamatan diadakan pada 4 Juni dan 10 Juni untuk mengatasi tantangan rendahnya cakupan PIN. Kepala Puskesmas Sorong Barat dan Puskesmas Malawei, yang memiliki populasi terbesar di Kota Sorong, diundang untuk mempercepat kegiatan PIN Polio. Alhasil, hingga 17 Juni 2024, Kota Sorong telah menerima 46.250 dosis nOPV2, yang telah didistribusikan ke 13 dari 18 puskesmas. Camat dan Kepala desa mendirikan pos imunisasi pada 8 Juni dan menyampaikan informasi kegiatan ini kepada masyarakat. Dinkes Kaimana dan Puskesmas Kaimana mengadakan rapat koordinasi. Puskesmas Kaimana bertanggung jawab atas 64% dari sasaran Kabupaten Kaimana. Per 3 Juni, Kabupaten Kaimana telah menjangkau 20,8%, sedangkan Puskesmas Kaimana menjangkau 17,5%. Untuk mempercepat imunisasi, Puskesmas Kaimana membentuk tujuh tim untuk melakukan sosialisasi informasi imunisasi di SD, TK, dan posyandu. Dinkes Kabupaten Kaimana dan UNICEF mengadakan kunjungan advokasi ke dinas pendidikan kabupaten untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan Polio di lembaga tersebut.
28 Mei 2024	Kota Jayapura	Kemenkes didampingi oleh WHO mengadakan rapat koordinasi dengan Dinkes Provinsi Papua untuk membahas mengenai strategi pelaksanaan PIN Polio. WHO

		menyarankan agar pimpinan pemerintahan melakukan kunjungan ke wilayah yang sasarannya besar. Asisten Gubernur Papua memutuskan untuk memonitor pelaksanaan PIN Polio pada tanggal 6 Juni di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.
29 Mei dan 3 Juni 2024	Mimika dan Manokwari	Dinkes Kabupaten Mimika dan WHO mengadakan pertemuan advokasi dengan kepala distrik dan kepala desa di Timika, Puskesmas Pasar Sentral, dan Distrik Mimika Baru. Berdasarkan pertemuan ini, kepala distrik dan desa mendirikan 55 pos imunisasi tambahan untuk Puskesmas Timika dan Pasar Sentral. Dinkes Kabupaten Manokwari juga mengadakan kunjungan advokasi ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, yang akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah desa untuk mendukung PIN polio. Kemudian, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan puskesmas untuk menyampaikan informasi dan menggerakkan masyarakat untuk diimunisasi.



Gambar 3. Pertemuan audiensi tentang strategi PIN dengan asisten 1 gubernur Papua, direktur Imunisasi Kemenkes, Dinkes Provinsi Papua, dan WHO. Kredit: WHO/Kornelius Langga Son



Gambar 4. WHO mendukung Puskesmas Malawei, Kota Sorong untuk berkoordinasi dengan kepala distrik untuk memetakan daerah-daerah kantong dan mengadakan sesi vaksinasi tambahan. Kredit: Puskesmas Malawei



Gambar 5. Pencanangan PIN polio di Puskesmas Kepi. Kredit: Gapai

Pelaksanaan PIN

TANAH PAPUA		
Tanggal	Tempat	Kegiatan
27 Mei 2024	Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondana, Kaimana, Kepulauan Yapen, Biak, Nabire, Dogiyai, dan Puncak	Kegiatan-kegiatan seperti pertemuan advokasi dan koordinasi, supervisi dan pemantauan, kampanye sosialisasi, dan pelatihan tenaga kesehatan direncanakan untuk memastikan efektivitas PIN polio. Kegiatan ini akan dijalankan di berbagai kabupaten/kota sesuai kebutuhannya masing-masing. Acara pencahangan PIN polio telah diadakan Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondana, Kaimana, Kepulauan Yapen, Biak, Nabire, Dogiyai, dan Puncak agar pimpinan setempat memberitahukan adanya pemberian imunisasi polio masal.
27-3 Juni 2024	Kota Sorong, Sorong, Timika dan Nabire	WHO mendukung dinkes kabupaten dan kota terkait dalam memantau pelaksanaan PIN di berbagai puskesmas di kabupaten/kota tersebut: Puskesmas Malawili, Mimika, Mopah, Sorong Barat, Remu, dan Kalibobo. Dalam kunjungan-kunjungan ini, ditemukan bahwa mikroplaning dan pengelolaan suhu vaksin telah dijalankan. Namun, beberapa orang tua belum memahami manfaat vaksin polio, dan sebagian kabupaten tidak memenuhi sasaran vaksinasi harian. Dalam mengatasi isu-isu ini, dinkes kabupaten/kota berencana mengadakan upaya advokasi dan koordinasi, misalnya dengan pemerintah desa untuk lebih memantau penerimaan imunisasi dengan instrumen pencatatan elektronik EPPGBM ³ , mendirikan pos-pos tambahan, dan melakukan sosialisasi.
27 Mei-15 Juni 2024	Yapen, Mappi, Biak Numfor, Boven Digoel, Asmat,	Selama kampanye PIN, UNICEF dan tim imunisasi setempat (Tim Imunisasi Papua Juara) memberikan bantuan teknis dan bantuan pemantauan dan supervisi. Kunjungan supervisi dilakukan di dinkes kabupaten dan provinsi serta gudang vaksin kabupaten, puskesmas, dan pos imunisasi (sekolah, pusat perkembangan dini anak, dan posyandu). Bantuan teknis diberikan terkait pengisian laporan kedatangan vaksin.
27 Mei-18 Juni 2024	Papua dan Kota Jayapura	UNICEF mengadakan kegiatan sosialisasi, termasuk penyusunan materi KIE, dialog interaktif dengan RRI Jayapura, dan pelibatan jurnalis setempat. Materi KIE dipublikasi dalam bentuk siaran radio, poster digital, dan baliho di dua area padat lalu lintas di Kota Jayapura. Pesan-pesan utama dari materi KIE ini berfokus pada informasi umum tentang polio, status polio di Papua, manfaat vaksinasi, dan informasi tentang PIN polio.
29 Mei 2024	Nabire dan Yapen	UNICEF, Dinkes Provinsi Papua Tengah, Dinkes Kabupaten Nabire, dan Dinkes Kabupaten Yapen mengadakan pertemuan advokasi dan diseminasi PIN polio di kedua kabupaten tersebut. Pertemuan-pertemuan ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemimpin setempat. Pertemuan ini mencakup praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran dari PIN sebelumnya dan mendorong tokoh setempat untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat.
30 Mei 2024	Papua Pegunungan	WHO, Dinkes Provinsi Papua Pegunungan, dan dinkes-dinkes kabupaten/kota mengadakan serangkaian pertemuan koordinasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan PIN polio. Sejumlah area

³ Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

		diketahui mengalami gangguan keamanan serius yang mengganggu pelaksanaan. Selain itu, banyak puskesmas belum menerima penjelasan tentang PIN polio. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya cakupan imunisasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, WHO mendorong dinkes provinsi untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan memprioritaskan dukungan bagi puskesmas-puskesmas dengan proporsi target yang besar. Gubernur juga akan menerbitkan surat instruksi untuk mendorong dinkes dan puskesmas setempat untuk menjangkau semua anak untuk vaksinasi.
30-31 Mei 2024	Mappi, Papua	Dinkes Provinsi Papua, Dinkes Kabupaten Mappi, UNICEF, dan WHO mengadakan pertemuan koordinasi lintas sektor dengan Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua, Gapai Papua, dinas-dinas pemerintah, organisasi profesional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan masyarakat. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan surat komitmen dukungan untuk PIN polio, termasuk dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan mobilisasi masyarakat. Surat ini memastikan semua pemangku kepentingan akan mendukung pemenuhan sasaran cakupan vaksinasi polio.
31 Mei 2024	Merauke	Dinkes Kabupaten Merauke mendirikan pos imunisasi baru di sebuah daerah miskin berisiko tinggi. Daerah padat penduduk ini merupakan tempat tinggal bagi populasi sasaran yang meliputi orang suku Asmat, di mana banyak anggotanya tidak memiliki dokumen identitas resmi. Pos baru ini diresmikan oleh dinkes provinsi dan kabupaten, pemimpin setempat, dan organisasi bidan, sebagai bukti dukungan masyarakat yang solid. Setelah keberhasilan pos ini, di mana 60 anak divaksinasi, pos lain diresmikan di daerah Onggatmit, memvaksinasi 102 anak. Pos-pos ini meningkatkan akses vaksin, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Selain tata laksana kasus polio di suku Asmat, surveilans AFP juga dilakukan selama vaksinasi untuk mengidentifikasi suspek baru dan kontak erat.
3 Juni 2024	Jayawijaya	WHO memantau PIN polio di Puskesmas Wesaput, yang terintegrasi dengan program posyandu rutin. PIN polio mengimunisasi 47 anak, angka yang terhitung rendah, mengingat kurangnya informasi meskipun sebenarnya tidak ada penolakan dari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, WHO merekomendasikan pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memobilisasi masyarakat, menetapkan pos-pos baru di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dan menggabungkan imunisasi desa-desa tetangga di satu posyandu. Sesi kedua di Posyandu Tongkonan mengimunisasi 50 anak dengan dukungan kepolisian. Puskesmas dianjurkan meminta vaksin nOPV2 melalui sistem SMILE. Puskesmas Wamena juga melanjutkan PIN di Posyandu Pelangi, di mana 39 dari 42 anak sasaran divaksinasi. WHO mendukung Puskesmas Ilegma dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kader untuk memastikan keamanan dari daerah-daerah konflik di sekitar. Hanya satu pos imunisasi yang didirikan, di kantor desa, dengan sasaran sebanyak 100 anak.
6 Juni 2024	Jayapura	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura akan menempatkan mahasiswa-mahasiswi mereka untuk mendukung PIN polio, setelah berlangsungnya pertemuan dengan UNICEF dan WHO. Penempatan ini dijadikan bagian dalam

		program kuliah kerja nyata mereka. Dinkes kabupaten akan melanjutkan koordinasi dan perencanaan ini dengan sekolah tersebut.
8 Juni 2024	Asmat	Dinkes kabupaten, UNICEF, dan GAPAI mengadakan pelatihan untuk staf pencegahan dan pengendalian infeksi polio dan promosi kesehatan Puskesmas Kepi di Mappi, yang dihadiri 23 peserta, untuk memastikan PIN polio berjalan efektif. Setelah pelatihan ini, dinkes dan puskesmas akan mengadakan sosialisasi untuk masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi.
4–14 Juni 2024	Nabire, Deiyai, Paniai, Puncak Jaya, Jayapura, Manokwari, dan Boven Digoel	Dinkes-dinkes kabupaten, dengan dukungan WHO dan UNICEF, mengevaluasi kampanye PIN polio di sejumlah kabupaten: Nabire, Deiyai, Jayapura, dan Manokwari. Temuan-temuan utama meliputi belum dimulainya kampanye di sembilan puskesmas di Nabire akibat tantangan geografis. Di Paniai dan Puncak Jaya, adanya isu keamanan, dan menunda pelaporan data. Deiyai belum memulai PIN karena permasalahan koneksi internet, yang berdampak pada input data. Di Jayapura, PIN ditunda karena bertepatan dengan jadwal akreditasi puskesmas, dan kesenjangan data. Di Manokwari, jumlah target melebihi jumlah populasi sebenarnya, dan sejumlah puskesmas mengklaim telah mencapai sasaran pada putaran pertama. Beberapa solusi yang direkomendasikan meliputi peningkatan keterlibatan pemerintah desa, pembentukan pos-pos imunisasi tambahan, pelaksanaan kampanye di Deiyai, penyesuaian sasaran cakupan dan pos imunisasi, alokasi sumber daya untuk daerah-daerah sulit dijangkau, dan pelibatan kader. Selain itu, diusulkan agar layanan <i>sweeping</i> dilanjutkan, kesenjangan data diverifikasi dengan penilaian cepat <i>rapid convenience assessment</i>, dan upaya kunjungan rumah ke rumah. Setelah pertemuan ini, dinkes kabupaten dan UNICEF mengadakan pertemuan dengan puskesmas di Boven Digoel. Pertemuan ini membahas strategi-strategi untuk menjangkau anak-anak yang belum diimunisasi dan kegiatan-kegiatan sosialisasi di masyarakat.
14 Juni 2024	Kota Jayapura	Puskesmas Abepura melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk menjangkau sasaran di sejumlah daerah pemukiman. Dalam kegiatan ini, petugas imunisasi menggerakkan masyarakat dan membagikan informasi mengenai PIN polio melalui pengeras suara. Metode ini efektif, dan puskesmas akan menerapkan metode yang sama di beberapa daerah lain untuk menjangkau lebih banyak sasaran.



Gambar 6. Mobilisasi masyarakat untuk imunisasi di Puskesmas Abepura, Kota Jayapura (kiri) dan dialog interaktif dengan WHO, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Dinkes Kabupaten Nabire (kanan) di RRI. Kredit: WHO/Kornelius Langga Son (kiri) dan Dinkes Kabupaten Nabire (Kanan)



Gambar 7. Imunisasi untuk orang-orang nomaden di Merauke (kiri) dan kunjungan advokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana (kanan). Kredit: WHO/Endang Sri Utami (kiri) dan Dinkes Kabupaten Kaimana/Kety (kanan)

Surveilans

TANAH PAPUA		
28-31 May 2024	Jayapura	WHO dan Kemenkes mengadakan lokakarya surveilans penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) untuk petugas surveilans dan petugas klinis. Lokakarya ini dihadiri oleh 125 peserta dari dinkes provinsi, dinkes kabupaten, rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Lokakarya ini mencakup praktik kajian data rumah sakit di empat rumah sakit di Jayapura. Setelah lokakarya ini, peserta menyusun rencana tindak lanjut seperti rencana peningkatan kapasitas untuk dinkes provinsi dan kabupaten, pelaksanaan surveilans berbasis rumah sakit, dan KKP melakukan peningkatan pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan.

Pengelolaan logistik dan vaksin

Menurut data yang dilaporkan melalui aplikasi SMILE per 17 Juni 2024, jumlah total dosis vaksin yang diterima oleh masing-masing provinsi adalah sebagai berikut: 236.050 dosis diterima oleh Papua, 107.350 oleh Papua Barat, 149.950 oleh Papua Selatan, 256.650 oleh Papua Tengah, 219.200 oleh Papua Pegunungan, dan 113.950 oleh Papua Barat Daya, dengan total 1.083.150 dosis.

Di Papua Selatan, 285 vial nOPV2 (1 vial berisi 50 dosis) masih tersedia untuk puskesmas-puskesmas yang belum memulai kampanye akibat puskesmas menyelesaikan akreditasi terlebih dahulu, relokasi, cuaca buruk, isu geografis, dll. Solusinya adalah agar puskesmas membuka segera pelayanan imunisasi PIN dan menggabungkan beberapa pos imunisasi dalam 1 hari, melakukan pelayanan imunisasi di wilayah prioritas meliputi wilayah yang memiliki target banyak dan mudah diakses.



Gambar 8. Pemantauan pengelolaan vaksin nOPV2 di gudang farmasi Dinkes Provinsi Papua Selatan. Kredit: WHO/Endang Sri Utami

Masalah utama

- **Frekuensi layanan yang rendah:** sebagian puskesmas hanya melakukan pelayanan di satu pos pelayanan PIN per hari.
- **Supervisi yang suboptimal:** supervisi dinkes provinsi dan kabupaten/kota atas kegiatan PIN masih belum cukup.
- **Kapasitas:** sebagian puskesmas menunda layanan polio akibat bersamaan dengan jadwal akreditasi, keamanan, dan kesenjangan data.

Rencana tindak lanjut

- **Kegiatan Monitoring:** Kemenkes, dinkes provinsi, dan dinkes kabupaten/kota memastikan puskesmas dan pos imunisasi melaksanakan PIN polio, memantau persediaan vaksin, dan menyampaikan umpan balik agar perbaikan dapat dilakukan.
- **Pertemuan advokasi:** dinkes kabupaten/kota dan puskesmas menggandeng pemerintah setempat (bupati dan kepala distrik) untuk mendukung dan memantau PIN polio.
- **Pemetaan:** puskesmas akan memetakan pos-pos imunisasi yang dibuka secara terpisah dalam satu hari dan pos-pos tambahan lainnya (di pusat perbelanjaan, gereja, dan pasar). Pemetaan ini akan menggambarkan sumber daya manusia tambahan yang dibutuhkan.
- **Dokumentasi:** Dinas kesehatan kabupaten/kota akan mendokumentasikan cakupan imunisasi PIN polio, evaluasi akan dilakukan pada puskesmas yang memiliki cakupan PIN yang rendah.
- **Mobilisasi masyarakat:** dinkes kabupaten/kota meminta wali kota/bupati untuk memobilisasi masyarakat setempat dan membagikan informasi dalam bentuk media cetak.
- **Penjangkauan komunitas:** dinkes kabupaten/kota dan mitra melakukan penjangkauan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan media (cetak, radio, dan TV) untuk mendiseminasikan informasi tentang PIN polio.

Mobilisasi dukungan

Kemenkes

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PIN polio di Pulau Papua.
- Memastikan komitmen pemerintah setempat untuk mendukung implementasi PIN polio.

WHO

- Membantu dinkes provinsi dan kabupaten/kota dalam mengadakan dan menentukan strategi untuk pelaksanaan PIN polio.
- Mengadvokasikan PIN polio kepada pemimpin distrik dan desa.
- Memantau dan mendukung distribusi vaksin ke kabupaten/kota dan desa.
- Membagikan prosedur pencatatan dan pelaporan yang tepat untuk instrumen-instrumen PIN.
- Mengadakan sesi re-orientasi PIN polio di puskesmas dan dinkes kabupaten/kota.

UNICEF

- Membantu advokasi ke berbagai program untuk mendukung pelaksanaan PIN polio serta pengelolaan vaksin nOPV2.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi, termasuk penyusunan materi KIE, melalui dialog interaktif di radio.

Kementerian Kesehatan: Direktorat Pengelolaan Imunisasi

imunisasi.tamsus@gmail.com
survdp3i.kipi@gmail.com

WHO:

Dr Stephen Chacko
chackos@who.int

Dr Sudhir Joshi
joshisu@who.int

UNICEF:

Dr Gopinath Durairajan
gdurairajan@unicef.org

Dr Kenny Peetosutan
kpeetosutan@unicef.org